

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR
DESENTRALISASI, EVALUASI ANGGARAN DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Anggun Wanudya
NIM. 15.0102.0133

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR
DESENTRALISASI, EVALUASI ANGGARAN DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh :
Anggun Wanudya
NIM. 15.0102.0133

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, EVALUASI ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

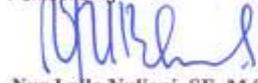
Anggun Wanudya

NPM 15.0102.0133

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **25 Juli 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing I

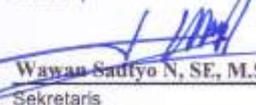
Pembimbing II

Tim Penguji



Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak

Ketua



Wawan Saefyo N, SE, M.Si, Ak, CA

Sekretaris



Veni Suraya Dewi, SE, M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **15 AUG 2019**



Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Wanudya
NIM : 15.0102.0133
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, EVALUASI
ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 19 Juli 2019

Pembuat Pernyataan




Anggun Wanudya
NIM 15.0102.0133

RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggun Wanudya
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 12 Desember 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Sunan Giri Rt 03 Rw 06 Karet
Jurangombo Magelang
Alamat Email : anggunwndy@gmail.com
Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar (2003-2009) : SDN Cacaban 4 Magelang
SMP (2009-2012) : SMP Negeri 6 Magelang
SMA (2012-2015) : SMA Negeri 2 Magelang
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang
Pendidikan Non Formal :
- *Basic Listening and Speaking Course* di UMMagelang Language Center
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer
UMMagelang
Pengalaman Organisasi :
- Komunitas Mahasiswa Entrepreneur (KOMET)

Magelang, 19 Juli 2019
Peneliti


Anggun Wanudya
NIM. 15.0102.0133

MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi”.
(Conan O' Brien)

“Berusahalah dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah menyerah”.
(Jamhur Wahyono & Retno Handayaningsih)

“Jadikanlah sabar dan Shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyur ”.
(QS. Al-Baqarah : 45)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”.
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah”.
(H.R Muslim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, EVALUASI ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Wawan Sadtjo Nugraha, SE ,M.Si, Ak, CA selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
3. Ibu Veni Soraya Dewi, SE, M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
5. Bapak Kartono dan Ibu Ludiyah selaku orang tua yang sangat saya hormati, yang tiada hentinya berjuang dan berdoa untuk keberhasilan putrinya. Bapak Kartono yang selalu berusaha menyekolahkan putrinya hingga S1 dan tidak lupa kakak saya Arum Sulistyani yang turut membantu kelancaran skripsi saya.
6. Para perangkat OPD di Kabupaten Magelang atas bantuan dan kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas telah membantu dan memberikan doa dalam menyelesaikan skripsi saya.

Magelang, 19 Juli 2019
Peneliti

Anggun Wanudya
NPM. 15.0102.0133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Telaah Teori.....	10
1. Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>).....	10
2. <i>Stewardship Theory</i>	11
3. Kinerja Pemerintah Daerah.....	13
4. Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	14
5. Kejelasan Sasaran Anggaran	16
6. Struktur Desentralisasi	17
7. Evaluasi Anggaran	18
8. Komitmen Organisasi	19
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	21
C. Perumusan Hipotesis	22
D. Model Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Populasi dan Sampel.....	30
B. Data Penelitian.....	31
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	32
D. Metode Analisis Data	34
E. Pengujian Hipotesis	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengambilan	39
B. Statistik Deskriptif Responden	39
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	41
D. Uji Kualitas Data	42
E. Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
F. Pengujian Hipotesis	46

G. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Keterbatasan Penelitian	58
C. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP pada Pemda Magelang Tahun 2014-2018.....	3
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	3
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	21
Tabel 3.1	Definisi dan Pengukuran Variabel	32
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	39
Tabel 4.2	Deskripsi Responden.....	40
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.4	Pengujian Validitas	43
Tabel 4.5	<i>Cross Loading</i>	43
Tabel 4.6	Pengujian Reliabilitas.....	45
Tabel 4.7	Hasil Uji Analisis Linier Berganda	45
Tabel 4.8	Koefisien Determinasi.....	46
Tabel 4.9	Uji F.....	47
Tabel 4.10	Uji t	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian Model Penelitian.....	29
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F	37
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Positif Penerimaan Hipotesis Positif.....	38
Gambar 4.1 Penerimaan Hipotesis Uji F	47
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	48
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran Penerimaan Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran	49
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Struktur Desentralisasi	49
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Evaluasi Anggaran	50
Gambar 4.6 Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner	65
Lampiran 2. Penyebaran Kuisisioner	71
Lampiran 3. Tabulasi Data Mentah.....	72
Lampiran 4. Tabulasi Data yang Diolah	81
Lampiran 5. Statistik Deskriptif.....	89
Lampiran 6. Uji Validitas.....	90
Lampiran 7. Uji Reliabilitas.....	96
Lampiran 8. Hasil Regresi.....	98
Lampiran 9. Pengujian CFA Setelah Penghapusan yang Tidak Valid.....	99
Lampiran 10. Bukti Penyebaran Kuisisioner	100
Lampiran 11. Surat Permohonan Ijin Riset.....	105

ABSTRAK

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, EVALUASI ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)**

Oleh:

Anggun Wanudya

Kinerja pemerintah daerah adalah wujud pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode pengumpulan data menggunakan metoda *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 102 pegawai di OPD Kabupaten Magelang. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan partisipasi penyusunan anggaran, struktur desentralisasi, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi, Evaluasi Anggaran, Komitmen Organisasional, Kinerja Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik dipemerintahan Indonesia telah membawa banyak perubahan besar, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang mendasar dan cukup signifikan dalam pemerintahan yaitu adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan, pelimpahan dan penugasan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Salah satu kewenangan yang diserahkan adalah urusan pemerintahan dalam hal penyusunan APBD.

Permendagri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah merupakan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Penyusunan APBD juga harus didasarkan atas pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang lebih fokus pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan (PP Nomor 12 Tahun 2019). Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di Pemerintah Daerah karena anggaran berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Kinerja pemerintah daerah adalah wujud pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Warisno, 2009). Dimana dalam

kinerja pemerintah daerah harus didasarkan atas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Mewujudkan tanggungjawab kinerja, maka pemerintah daerah perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Dalam laporan kinerja yang disusun oleh setiap SKPD didalamnya disajikan informasi tentang: (1) uraian singkat organisasi, (2) rencana dan target kinerja yang direncanakan, (3) pengukuran kinerja, (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014). Pada akhir masa anggaran setiap tahunnya, kinerja seluruh SKPD akan dinilai, dievaluasi dan dianalisis berdasarkan penilaian pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999. Beberapa SKPD Kabupaten Magelang tahun 2018 mengalami keterlambatan dalam menyampaikan hasil evaluasi kinerja dalam rapat evaluasi kerja, menjadikan beberapa SKPD dikeluarkan dari ruang rapat. Zaenal menegaskan bahwa SKPD harus dapat mewujudkan tanggung jawab terhadap kewajibannya secara lebih disiplin (<http://borobudurnews.com>). Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Magelang menurut hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tabel 1:

Tabel 1.1
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP pada Pemda Magelang
Tahun 2014-2018

No	Instansi Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Yogyakarta	B	BB	BB	BB	BB
2	Kab. Bantul	B	B	BB	A	A
3	Kab. Sleman	B	B	BB	BB	A
4	Kab. Kulon Progo	B	B	BB	A	A
5	Kab. Gunung Kidul	CC	CC	B	BB	B
6	Kota Magelang	CC	CC	B	B	B
7	Kab. Magelang	CC	CC	CC	CC	CC
8	Kab. Klaten	C	C	C	B	B
9	Kab. Purworejo	C	C	CC	B	B
10	Kab. Kebumen	CC	CC	CC	CC	B
11	Kab. Cilacap	CC	CC	B	BB	BB

Sumber : www.bpkp.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi LAKIP Kabupaten Magelang ditahun 2014-2018 secara konstan memperoleh skor CC atau nilai “Cukup Baik (memadai)” dan masih perlu banyak perbaikan. Artinya indikator-indikator penilaian dalam LAKIP belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan hasil penilaian tersebut mengindikasikan bahwa indikator kinerja Kabupaten Magelang belum semuanya sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran yang masih tinggi. Laporan realisasi anggaran pemerintahan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2014-2018 mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan realisasi anggaran dinilai masih fluktuatif. Berikut Laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018:

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	%
2014	2.002.563.832.687	1.655.060.222.422	373.919.112.857	82,65%
2015	2.226.627.483.960	1.744.730.814.575	492.803.710.268	78,36%

**Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018
(Lanjutan)**

Tahun	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	%
2016	2.456.203.348.064	2.036.310.089.428	457.559.190.778	84,35%
2017	2.840.739.361.778	2.271.336.015.858	303.453.321.294	86,30%
2018	2.366.508.483.200	2.304.504.798.038	225.604.865.619	89,64%

Sumber : www.magelangkab.go.id

Berdasarkan Laporan realisasi anggaran pemerintahan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2014-2018 dapat dinyatakan bahwa SILPA ditahun 2015 semakin meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah belum dapat melaksanakan indikator kinerja secara optimal. Tingginya SILPA ditahun 2015 menggambarkan bahwa APDB kurang sehat dan anggaran yang begitu besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu adanya tindakan untuk mengevaluasi kinerja OPD.

Penelitian terdahulu terkait kinerja Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan, akan tetapi beberapa hasil penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang telah dilakukan Fitra (2016) pada Kota Padang, menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan umpan balik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan untuk evaluasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dilakukan Nurlelahayati *et al.*, (2017) yang melakukan penelitian di SKPD Kota Lhokseumawe, memperoleh hasil bahwa umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian

Maramis *et al.*, (2016) yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara menyatakan bahwa partisipasi pejabat struktural dalam penyusunan anggaran, profesionalisme, dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian Solekhah *et al.*, (2016) di SKPD Kota Samarinda, memperoleh hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Posi (2018) di SKPD Kota Ternate, yang memperoleh hasil bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Awalliah (2018) di Kabupaten Barito Timur, yang memiliki hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara bersama berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Penelitian (Hariani, 2018) yang dilakukan pada SKPD Jakarta Barat, hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan kesulitan mencapai tujuan anggaran tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah, sedangkan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Posi (2018) dengan persamaan menggunakan keseluruhan variabel. Sedangkan perbedaannya yaitu, **pertama** menambah variabel evaluasi anggaran karena dengan adanya evaluasi anggaran dapat digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi, dimana penyimpangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk

mengukur efisiensi dan penilaian kinerja (Salbiah & Rizky, 2012). Selain itu pada OPD di Kabupaten Magelang hasil evaluasi masih secara konstan memperoleh skor CC dan masih perlu banyak perbaikan. Berdasarkan pemeroleh penilai tahun sebelumnya perlu dilakukan evaluasi anggaran. Karena dengan dilakukannya evaluasi anggaran, maka akan diketahui kinerja organisasi pada periode itu, dan diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Penambahan variabel evaluasi anggaran tersebut mengacu pada penelitian (Nurlelahayati *et al.*, 2017).

Kedua, menambah variabel komitmen organisasi karena komitmen organisasi menjadi bentuk tanggung jawab pegawai kepada pekerjaannya. Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya komitmen yang kuat dan usaha yang keras pada setiap anggota timnya agar tercapainya tujuan organisasi (Randall, 1990). Selain itu masih terdapat beberapa SKPD di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mengalami keterlambatan dalam menyampaikan hasil evaluasi kinerja. Adanya komitmen organisasi yang ditanamkan pada tiap pegawainya maka akan dapat digunakan untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap kewajibannya secara lebih disiplin. Penambahan variabel komitmen organisasi mengacu pada penelitian (Nurlelahayati *et al.*, 2017).

Ketiga, objek penelitian dilakukan pada OPD Kabupaten Magelang karena dalam pelaksanaan kinerja pemerintah di Kabupaten Magelang belum dapat terealisasi dengan optimal. Terbukti dengan laporan hasil evaluasi pada LAKIP memperoleh predikat CC dari tahun 2014 sampai 2018. Pada bagian sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan realisasi anggaran masih belum

dapat secara efektif untuk menilai kemaksimalan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ?
3. Apakah struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ?
4. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

- a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini diharap dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
- c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi dalam hal yang berkaitan kinerja pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun tinjauan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja pemerintah daerah dapat terealisasi dengan baik dan sebagai acuan serta motivasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah dengan mengukur nilai kerjanya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Goal Setting Theory merupakan teori yang menekankan pada pentingnya hubungan antara yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Locke & Latham (1990) mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja) dan berkomitmen untuk mencapainya, maka akan memberikan umpan balik pada kinerja, dan mempertimbangkan kompleksitas tugas. Konsep dasarnya Teori Penetapan Tujuan adalah seseorang mampu memahami tujuan yang diinginkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori Penetapan Tujuan menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua *cognition* yaitu *values* (nilai) dan *intentions* (tujuan). *Values* (nilai) merupakan apa yang dihargai seseorang sebagai upaya mendapatkan kemakmuran. Sementara *intentions* (tujuan) merupakan hal yang ingin dicapai dan pendorong dalam mempengaruhi perilaku dan akan mengarah pada kinerja yang lebih tinggi.

Teori Penetapan Tujuan memiliki pandangan bahwa keterlibatan menetapkan anggaran secara langsung akan menciptakan komunikasi yang baik antar anggota tim. Adanya komunikasi yang baik maka akan meminimalisasi kegagalan pencapaian tujuan, dan akan menciptakan tujuan yang dapat dicapai secara baik, cepat dan penilaian kinerja baik. Diperlukan pemahaman dan kelengkapan informasi untuk dapat

menetapkan anggaran, maka diperlukan adanya kejelasan mengenai informasi sasaran anggaran. Adanya informasi mengenai kejelasan sasaran anggaran akan membantu dalam menetapkan anggaran yang sesuai dengan kondisi dan membantu mempertanggungjawabkan keberhasilan program. Pendelegasian wewenang kepada pihak yang lebih rendah dalam menetapkan keputusan anggaran. Maka artinya pihak yang lebih rendah diberikan kepercayaan untuk bertanggungjawab atas keputusan anggaran organisasi. Sehingga tujuan dapat cepat diselesaikan karena pihak tersebut merasa menanggung beban atas tujuan organisasi bersama.

2. *Stewardship Theory*

Stewardship theory merupakan sebuah pengembangan dari kondisi manajer yang termotivasi atas sebuah target yang berasal dari hasil sasaran utama untuk kepentingan organisasi bukan termotivasi pada kepentingan pribadinya (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya sebuah hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pada kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Sedangkan pada maksimalisasi utilitas kelompok berhubungan dengan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. *Stewardship theory* juga menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Apabila adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama sebab bertindak sesuai dengan

tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama mampu menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama.

Menurut Murwaningsari (2009) *stewardship theory* didasarkan atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Asumsi lain mengenai filosofi mengenai *stewardship theory* dibangun dengan menambahkan kepemilikan integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya, maka *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri, 2005).

Konsep dasar *stewardship theory* adalah pimpinan menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan hidup (Raharjo, 2007), maka dari pemahaman tersebut sebuah komitmen organisasi menjadi penentu adanya sebuah keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sebuah tujuan merupakan sebuah tanggungjawab seorang pemimpin. Sedangkan dikaitkan dengan anggaran maka adanya evaluasi anggaran akan menjadikan pengukur dan penilai sampai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan sudah dapat dilaksanakan. Sehingga adanya evaluasi anggaran akan mampu digunakan untuk mencari penyimpangan atas anggaran di departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, *stewardship*

theory sebenarnya telah dipraktikkan, pada organisasi sektor publik yang dimaksud *steward* adalah pegawai dan *principals* dalam hal ini adalah Pemerintah.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan organisasi (Mahsun *et al.*, 2011). Kinerja juga dapat diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Surjadi, 2009). Syafrial (2009) mendefinisikan kinerja pada sektor pemerintah sebagai suatu prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur (Bastian, 2009). Mahsun *et al.*, (2006) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang

memiliki keunikan sendiri-sendiri. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Suatu organisasi yang profesional tidak akan mampu mewujudkan suatu manajemen kinerja yang baik tanpa ada dukungan yang kuat dari seluruh komponen manajemen perusahaan dan juga tentunya para pemegang saham. Karena dalam konteks manajemen modern suatu kinerja yang sinergis tidak akan bisa berlangsung secara maksimal jika pihak pemegang saham atau para komisaris perusahaan hanya bertugas untuk menerima keuntungan tanpa memperdulikan berbagai persoalan internal dan eksternal yang terjadi di organisasi.

4. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran menurut Dharmanegara (2010) merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, sehingga pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam prosesnya. Partisipasi dalam penyusunan

anggaran diartikan oleh Mulyadi (2001) sebagai “keikutsertaan operating manager dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan datang yang akan ditempuh oleh operating managers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran”. Partisipasi anggaran sebagai “suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya”. Pengertian partisipasi dalam penganggaran secara lebih terperinci disampaikan oleh Milani (2005) yaitu : 1) Seberapa jauh anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para manajer, 2) Alasan- alasan para atasan pada waktu anggaran dalam proses revisi, 3) Frekuensi menyatakan inisiatif, memberikan usulan dan atau pendapat tentang anggaran kepada atasan tanpa diminta, 4) Seberapa jauh manajer merasa mempunyai pengaruh dalam anggaran final, 5) Kepentingan manajer dalam kontribusinya pada anggaran dan 6) Frekuensi anggaran didiskusikan oleh para atasan pada waktu anggaran disusun.

Tahapan dalam penyusunan anggaran dimulai dengan dilakukannya penjaringan aspirasi masyarakat, kemudian hasil aspirasi masyarakat akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan (Bangun, 2009). Keunggulan yang biasanya diungkapkan atas partisipasi anggaran, yaitu: (1) Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak, (2) Orang yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran, (3) Orang lebih cenderung untuk mencapai

anggaran yang penyusunanya melibatkan orang lain, dan (4) Suatu partisipasi anggaran mempunyai sistem pengendalian tersendiri, sehingga jika tidak mencapai anggaran, maka yang harus disalahkan adalah diri sendiri dan apabila anggaran diturunkan dari atas, maka selalu beralih bahwa anggarannya tidak masuk akal atau tidak realistis diterapkan dan dicapai.

Tingkat partisipasi yang tinggi cenderung mendorong manajer untuk lebih aktif didalam memahami anggaran, dan manajer akan memiliki pemahaman yang baik dalam menghadapi kesulitan pada saat pelaksanaan anggaran. Dan anggaran dapat dinyatakan efektif dan berhasil apabila pelaksanaannya harus dapat melibatkan bawahan dalam tanggungjawab pengendalian biaya guna membuat estimasi anggaran.

5. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menurut merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Kenis, 1979). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran biasa digunakan sebagai alat untuk manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kinerja suatu unit organisasi dinilai baik secara finansial.

Menurut Bastian (2006) dalam menentukan kejelasan sasaran anggaran tersebut telah disusun Kepala daerah berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Pada anggaran daerah seharusnya tidak hanya memuat tentang informasi pendapatan dan penggunaan dana (belanja), namun juga harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai. Anggaran Pemerintah daerah harus mampu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa memberikan gambaran sasaran kinerja secara jelas. Sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas dan spesifik, sehingga dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

6. Struktur Desentralisasi

Struktur desentralisasi adalah pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi apabila sebagian otoritas didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi (Posi, 2018). Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada yang lebih rendah (Hansen & Mowen, 2000). Dengan demikian manajer puncak dapat mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada manajer bawahannya dalam pembuatan keputusan, sehingga membawa konsekuensi tanggung jawab semakin besar bagi pimpinan yang lebih rendah terhadap implemmentasi terhadap keputusan yang dibuat (Diana, 2013). Dengan adanya struktur sentralisasi yang tinggi, maka sebagian keputusan diambil

pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Desentralisasi yang ditampilkan dalam penyusunan anggaran menyebabkan semakin luasnya tanggung jawab pada unsur-unsur pelaksanaan penyusunan anggaran serta kebijakan secara independen, sehingga menjadikan semakin tinggi pula wewenang manajer dalam mengambil keputusan yang tepat pada struktur desentralisasi. Pada penyusunan perencanaan dan implementasi program layanan bagi masyarakat lebih banyak diserahkan pada peran SKPD dibandingkan dengan peran pemerintah berdasarkan berdasarkan struktur pemerintahan yang ada, terutama di tingkat kecamatan dan juga desa. Sehingga membawa konsekuensi pada alokasi pembiayaan pembangunan yang lebih besar di SKPD dibandingkan di pemerintah ditingkat kecamatan dan desa.

7. Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri adanya penyimpangan atas anggaran pada departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Cara di mana anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan (Hansen & Stede, 2004; Mui Yee *et al.*, 2016). Salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah dengan evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya merupakan proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya,

sehingga dari hasil perbandingan dapat diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja (Salbiah & Rizky, 2012).

Semakin lama serta semakin kompleksnya anggaran, semakin besar pula kemungkinan perlu adanya perubahan. Ketika anggaran dievaluasi maka akan didapat suatu perbandingan antara apa yang telah dianggarkan dengan yang telah dicapai. Jadi, dengan adanya evaluasi anggaran maka dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah (Yeyen, 2013).

Evaluasi anggaran menjadi kebijakan dan prosedur untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi. Evaluasi yang dilakukan secara periodik menjadi proses pengendalian anggaran dan hasil evaluasi anggaran menjadi umpan balik bagi pelaksana anggaran. Evaluasi anggaran mengukur sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD yang ditelusuri oleh pimpinan kemasing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.

8. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang individu memihak kepada organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins & Judge, 2009). Cakupan dalam komitmen organisasi terdiri atas unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Menurut Luthans (2011), konsep

komitmen organisasi merupakan pendekatan sikap dimana komitmen didefinisikan sebagai: 1) keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; 2) keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi; dan 3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Komitmen organisasi terbentuk pada dasarnya adanya komitmen karyawan (individu). Menurut Mowday *et al.*, (1979), komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain adalah: (a) Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi, (b) Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan, dan (c) Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Komitmen organisasi menyiratkan hubungan pegawai (individu) dengan organisasi secara aktif. Dengan adanya komitmen yang tinggi pada pegawai (individu), maka individu akan memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Sebaliknya, seorang pegawai (individu) yang memiliki komitmen yang rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang lebih besar menyangkut kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi anggota jangka panjang dari organisasi (Griffin, 2002). Dengan demikian komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana

individu memiliki kepercayaan, keterikatan, serta perasaan memiliki atas perusahaan sehingga individu tersebut akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil
1.	Asrini (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu.	Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu.
2.	Damanik (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.	Secara simultan sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD.
3.	Nurlelahayati <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Kota Lhokseumawe.	Umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
4.	Awalliah (2018)	Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara bersama berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
5.	Hariani (2018)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Walikota Jakarta Barat).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran dan kesulitan mencapai tujuan anggaran tidak berpengaruh pada kinerja aparatur pemerintah daerah, sedangkan evaluasi

**Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil
6.	Hendra (2018)	Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo).	anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
7.	Posi (2018)	Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja SKPD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.	Hasil uji simultan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Ternate.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah

Menurut Dharmanegara (2010) partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuat, dan pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam prosesnya. Keunggulan yang partisipasi anggaran, yaitu: (1) Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak, (2) Orang yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai kedudukan terpenting dalam

pembuatan estimasi anggaran, (3) Orang lebih cenderung untuk mencapai anggaran yang penyusunannya melibatkan orang lain, (4) Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem pengendalian tersendiri, jika tidak mencapai anggaran maka yang harus disalahkan adalah diri sendiri dan apabila anggaran didrop dari atas, maka selalu beralih bahwa anggaran tidak realistis dicapai.

Teori Penetapan Tujuan menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua *cognition* yaitu *values* (nilai) dan *intentions* (tujuan). Oleh sebab itu, perilaku seseorang dapat dilihat dari upaya keterlibatan mereka dalam menetapkan anggaran pemerintah daerah. Dengan adanya upaya keterlibatan langsung dalam penyusunan anggaran, maka akan menciptakan komunikasi yang baik antar anggota tim, sehingga tercipta motivasi yang besar untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan anggaran juga dapat tercipta dengan baik karena adanya campur tangan dan usulan dari setiap unit-unit kerja untuk memutuskan anggaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi, semakin tinggi partisipasi anggaran dalam organisasi, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian menurut Asrini (2017), Heski *et al.*, (2017), Hendra (2018) dan Posi (2018) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga adanya partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H₁. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Kenis, 1979). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kejelasan sasaran anggaran memiliki maksud untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Dimana akan berpengaruh pada perilaku untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Memperoleh kejelasan informasi sasaran anggaran dalam menetapkan tujuan, akan membantu organisasi dalam menyusun anggaran. Kejelasan sasaran anggaran juga memberi kemudahan untuk mempertanggungjawabkan akan keberhasilan pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini dikarenakan pegawai akan melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja. Jadi, apabila anggaran tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuaiya penggunaan dari anggaran yang semulanya direncanakan.

Berdasarkan penelitian Asrini (2017), Heski *et al.*, (2017) dan Posi (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga dengan semakin tingginya kejelasan sasaran anggaran yang diberikan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H₂ . Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Pengaruh struktur desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah

Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada yang lebih rendah (Hansen & Mowen, 2000). Manajer puncak dapat mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada manajer bawahannya dalam pembuatan keputusan, sehingga membawa konsekuensi tanggung jawab semakin besar bagi pimpinan yang lebih rendah terhadap implemementasi terhadap keputusan yang dibuat (Diana, 2013). Dengan adanya struktur desentralisasi yang tinggi, maka sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi.

Hubungan antara tujuan yang ditetapkan akan dapat berpengaruh terhadap kompleksitas tugas. Adanya struktur desentralisasi diharapkan dapat lebih mudah dalam menyelesaikan salah satu permasalahan tugas yaitu dalam menetapkan keputusan anggaran. Pemimpin dalam mengambil keputusan anggaran berupaya untuk membuat anggaran yang sesuai dengan kondisi kinerja pada organisasi, dan memahami cara untuk

dapat merealisasikan tujuan agar cepat tercapai. Penetapan tujuan organisasi juga akan menghasilkan sebuah tujuan anggaran yang mencakup semua pendapat dari setiap bagian. Adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, maka pihak manajer tingkat bawah akan menggunakan wewenang tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kinerjanya.

Menurut penelitian Heski *et al.*, (2017), Posi (2018) dan Irzan *et al.*, (2018) menyatakan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pelaksanaan struktur desentralisasi, maka akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H₃. Struktur Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Evaluasi anggaran merupakan kebijakan dan prosedur untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi. Hal tersebut menjadi pedoman bahwa dalam menyiapkan anggaran perlu adanya evaluasi program yang telah direncanakan pada pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan *Stewardship Theory* dinyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Adanya

evaluasi anggaran maka artinya pegawai diberikan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan dari pimpinan untuk dapat mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada anggaran diorganisasi. Apabila dalam melaksanakan evaluasi anggaran dapat dilaksanakan dengan memuaskan maka akan berdampak pada terciptanya kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi. Dilakukannya evaluasi anggaran pada setiap program kerja akan berguna untuk memperbaiki adanya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. Evaluasi anggaran juga dapat menjadi dorongan dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan anggaran suatu organisasi agar dapat disusun menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Sehingga dengan adanya evaluasi anggaran pada setiap program kerja maka akan menjadikan kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Pada penelitian Nurlalahayati *et al.*, (2017) dan Hariani *et al.*, (2018) menyatakan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, sehingga dengan meningkatkan pelaksanaan evaluasi anggaran, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H₄. Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat dengan organisasinya

(Nurlelahayati *et al.*, 2017). Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi maka akan melihat dirinya sebagai pegawai yang sejati terhadap organisasinya. Sebaliknya, seorang individu yang memiliki komitmen yang rendah, maka lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi karyawan pada organisasi untuk jangka waktu yang lama dari organisasi (Griffin, 2002).

Konsep dasar *Stewardship Theory* adalah penyelarasan antara tujuan *steward* dengan tujuan *principal*. Komitmen organisasi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi, adanya kesamaan tujuan antara pimpinan dengan para pegawai maka akan menjadikan komitmen organisasi pada diri tiap pegawai menjadi motivasi untuk semakin meningkat kinerjanya. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi maka akan menjadikan pegawai untuk selalu berusaha keras agar organisasi menjadi semakin baik. Komitmen organisasi pada para pegawai juga dapat memberikan keyakinan bagi pihak organisasi terhadap pegawainya bahwa mereka sanggup melaksanakan dan siap untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

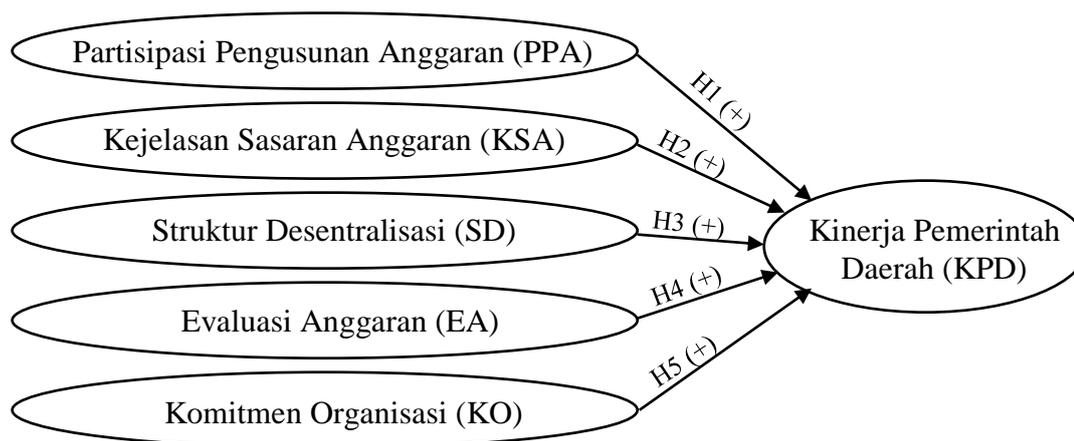
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2017), Nurlelahayati *et al.*, (2017) dan Awalliah (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi komitmen organisasi seorang

pegawai, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H₅. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah yang ada pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang yang terdiri dari Kantor, Dinas dan Badan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala dinas, kepala sub bagian, kepala sub bagian keuangan, bendahara atau verifikator, pejabat penatausahaan keuangan dan staf keuangan atau akuntansi atau pembukuan sebagai unit analisis.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dengan pertimbangan bahwa masa kerja selama satu tahun cukup untuk menilai kinerjanya sendiri sehingga hasilnya lebih valid.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2014:193).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria responden di kantor OPD di Kabupaten Magelang. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel		
Dependen:		
Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)	Suatu prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode (Syafrial, 2009).	Instrumen kuesioner dari (Baron & Greeberg, 1990) terdiri dari 5 pernyataan, dengan indikator: Pencapaian target, tepat waktu dalam penyelesaian tugas, kualitas pekerjaan yang baik, inisiatif bekerja, dan pencapaian serta pelaksanaan program organisasi. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 1-5.
Variabel		
Independen:		
Partisipasi Penyusunan Anggaran (PA)	Proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, sehingga pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam prosesnya (Dharmanegara, 2010).	Instrumen kuesioner dari (Milani, 1975) terdiri dari 6 pernyataan, dengan indikator: Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran, kemampuan memberi pendapat dalam penyusunan anggaran, frekuensi pemberian pendapat dan usulan kepada atasan, memiliki pengaruh atas anggaran final, kontribusi dalam penyusunan anggaran dan frekuensi atasan meminta pendapat ketika anggaran disusun. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 1-5.
Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)	Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Kenis, 1979).	Instrumen kuesioner dari (Locke & Latham (1990) terdiri dari 7 pernyataan, dengan indikator: Tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 1-5.

**Definisi dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Struktur Desentralisasi (SD)	Praktik pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan yang diberikan kepada yang lebih rendah (Hansen & Mowen, 2000).	Instrumen kuesioner dari (Narayanan <i>et al.</i> , 1984) terdiri dari 6 pernyataan, dengan indikator: Wewenang menentukan jumlah, wewenang menentukan program dan kegiatan, wewenang menentukan keterlibatan, wewenang menentukan skala prioritas, wewenang menentukan penambahan dan wewenang menentukan mutasi pegawai. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 1-5.
Evaluasi Anggaran (EA)	Tindakan penelusuran penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979).	Instrumen kuesioner dari (Kenis, 1979) terdiri dari 7 pernyataan, dengan indikator: Pemberitahuan tentang penyimpangan anggaran, siapa yang bertanggungjawab atas penyimpangan anggaran, respon atasan terhadap penyimpangan anggaran yang besar dan fungsi anggaran sebagai pengawasan. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 1-5.
Komitmen Organisasi (KO)	Keadaan dimana seorang individu memihak kepada organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins <i>et al.</i> , 2009).	Instrumen kuesioner dari (Rustini, 2015) terdiri dari 8 pernyataan, dengan indikator: Keinginan, , emosi, loyalitas, kepedulian. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 1-5.

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Peneliti Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2018:19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuisisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.

Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA).

Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading* $> 0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach alpha* (α) dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh (Ghozali, 2018:46), yaitu jika koefisien *cronbach alpha* $> 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *cronbach alpha* $< 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, evaluasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{KPD} = \alpha + \beta_1\text{PPA} + \beta_2\text{KSA} + \beta_3\text{SD} + \beta_4\text{EA} + \beta_5\text{KO} + e$$

Keterangan:

KPD	= Kinerja Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
PPA	= Partisipasi Penyusunan Anggaran
KSA	= Kejelasan Sasaran Anggaran
SD	= Struktur Desentralisasi

EA	= Evaluasi Anggaran
KO	= Komitmen Organisasi
ε	= <i>Error</i> (kesalahan)

E. Pengujian Hipotesis

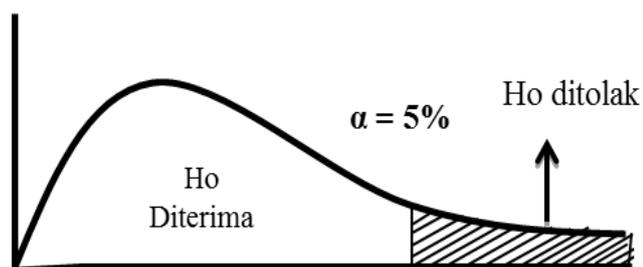
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2018:97).

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual. Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan *fit* atau tidak *fit* (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan perbandingan antara F hitung dan F tabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 5% dengan derajat pembilang (df_1) = k dan untuk derajat kebebasan penyebut (df_2) = n-k-1 dengan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria:

- a) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- b) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak *fit*).



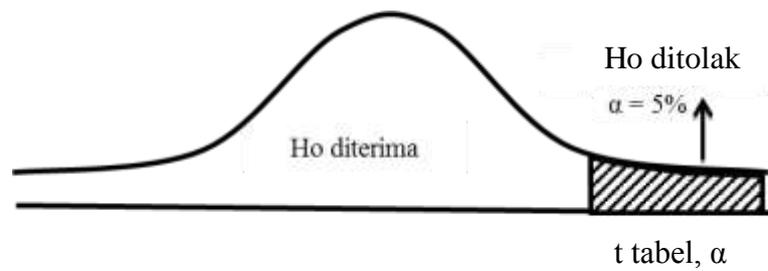
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018:99).

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

- a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Positif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Sampel yang diambil yaitu OPD Kabupaten Magelang sebanyak 4 Kantor, 4 Badan dan 17 Dinas. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 102 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 27,5% sedangkan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian sudah bagus. Pada hasil uji t menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan Partisipasi Penyusunan Anggaran, Struktur Desentralisasi Anggaran, Evalausi Anggaran, dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di Kabupaten Magelang, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh kabupaten lain mengenai kinerja pemerintah daerah.
2. Penelitian ini menggunakan sampel sebagian besar adalah staf akuntansi/keuangan/pembukuan sehingga belum dapat mengeneralisasi kinerja pemerintah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi untuk menjelaskan variabel kinerja pemerintah daerah.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambah populasi di Kabupaten-kabupaten lain agar lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian berikutnya diharapkan memilih sampel yang ditujukan kepada pimpinan (kepala dinas dan kepala sub bagian) sehingga hasil akan lebih signifikan.

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah seperti transparansi, gaya kepemimpinan, dan variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Asrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Palu: Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Vol 5 No.1*.
- Awalliah, R. 2018. Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Jilid 4 No.3*.
- Bangun, A. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Baron, R. A & Greenberg, J. 1990. *Behaviour in Organization: Understanding and Managing The Human Side of Work*. 3rd ed. New York: Allyn & Bacon.
- Bastian, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Damanik, E. S. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. *Jurnal of Economics and Business, Vol.1 No.1*.
- Dharmanegara, Idha. B. A. 2010. *Penganggaran Perusahaan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Mangement, Vol. 16*.
- Etin Solihatin & Raharjo. 2007. *Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS*. Jakarta : Bumi Aksara
- Etty Murwaningsari. (2009). *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Kontinum*. Universitas Trisakti.
- Ferdiani, Destaria, A. R. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja

Manajerial Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 1*, 1–14.

Fitra, Y. A. 2016. Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pamerintah Daerah (Studi Empiris Skpd Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.

Griffin, J. 2002. *Customer Loyalty How to Earn It, How to Keep It*. Kentucky: McGraw-Hill.

Hansen, Don. R. & Maryanne. M. Mowen. 2000. *Akuntansi Manajemen. Edisi Kedua. Terjemahan A. Hermawan*. Jakarta: Erlangga.

Hansen, S. C., & Stede, W. A. 2004. Multiple Facets Of Budgeting: An Exploratory Analysis. *Management Accounting Research, 15(4)*, 415.

Hariani, S. & Veny. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Walikota Jakarta Barat). *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 11 No.2*.

Hendra, J. 2018. Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885*.

Heski, P, Purwanti. D. T, A. F. 2017. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang). *University Research Colloquium, ISSN 2407*.

Hikalmi. 2015. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran dan Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Pupuk Iskandar Muda. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

<http://borobudurnews.com>

<http://bpkad.jatengprov.go.id>.

Husain, S. P. 2014. Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo). *Jurnal*

Universitas Gorontalo.

- Irzan, M, Abdullah, S. 2018. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Struktur Desentralisasi, dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada SKPD Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 2*
- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung. *Tesis.*
- Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review, 4, 707–721.*
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017.
- Locke, E. A., dan Latham. 1990. *A Theory of Goal Setting and Task Performance.* : Prentice. New Jersey: Hall Inc.
- Luthans, F. 2011. *Organizational Behavior* (12 th Edit). McGrawHill Companies, Inc.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanurgraha, H. . 2011. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPFE.
- Maramis, Lidya A., Saerang, David P. E. dan Warongan, J. D. . 2016. Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, dan Struktur Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Kambupaten Minahasa Utara.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit: CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Milani, K. W. 2005. The Relationship of Participation in Budget-setting of Industrial Supervisor Performance and Attitudes: a Field Study. *The Accounting Review, 50.*
- Mowday R., Steers. Richard. and Porter. L. 1979. The measure of organizational commitment. *Journal of Vocational Behaviour, 14(2), 224–227.*
- Mufarrohah, T, S., & Purnomosidhi, B., 2013, Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi empiris pada Kabupaten Madura), *Jurnal InFesti Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 9 No 2 Desember 2013,* hal: 123-136.
- Mui Yee, C., Wong S. K. E., Ismail, K. 2016. An Analysis of Budgetary Goals

Impacting Organizational Performance. *Audit Financiar*, XIV. 5 (13).

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Narayanan, and Gordon. 1984. Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty and Organization Structure: An Empirical Investigation, *Accounting, Organization and Society*, Vol. 9, No, 33–37.

Nurhalimah., Darwanis., & Syukriy Abdullah. 2013. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh”. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN: 2303-0164. Vol.2 No.1. h: 27-36.

Nurlelahayati, Mirna Indriani, F. S. B. 2017. Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3, 134–150.

Olinda, M. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON*, 2(2).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Posi, S. H. 2018. Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja SKPD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. . *Jurnal Hibualamo*, Volume 2.

Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Randall, D. M. 1990. The Consequences of Organizational Commitment: Methodological Investigation. *Journal of Organizational Behavior*, 11, 361–37.

Robbins Stephen P., Judge, T. 2009. *Organizational Behaviour*, 13th Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, pp. 209-586

- Rustini, Ni Komang A. Suardikha, I. M. S. Astika, I. B. P. 2015. Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja pada Komitmen Organisasi dan Implikasinya pada Kinerja Pengelola Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 20 No. 2.
- Salbiah., Rizky, R. 2012. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 15 (2), 42.
- Solekhah, Y dan Ruliana, T. 2016. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda). *Jurnal Artikel Ekonomia*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Syafriah. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis* . Universitas Sumatera Utara.
- www.bpkb.go.id. (n.d.).
- www.magelangkab.go.id. (n.d.).
- Yeyen. 2013. Pengaruh Revisi Anggaran, Partisipasi Anggaran, Tingkat Kesulitan, Serta Evaluasi dan Umpan Balik Terhadap Pencapaian Anggaran yang Efektif (studi Empiris pada SKPD Kota Payakumbuh). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Yuliani. 2010. Pengaruh Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta. *Skripsi* . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.